

RINGKASAN

Kinerja pelayanan publik di Indonesia dinilai masih buruk. Hal tersebut ditandai dengan petugas pelayanan publik yang masih belum efektif atau menunda pelayanan, padahal pelayanan publik adalah wujud nyata kinerja pemerintah daerah yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Namun pemerintah daerah belum dapat mewujudkan kinerja yang terbaik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rendah. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelayanan dasar tersebut yang digunakan untuk mengukur indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menunjukkan capaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari teratasinya permasalahan mendasar masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Salah satu permasalahan mendasar dari capaian keberhasilan pembangunan manusia adalah kemiskinan, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat pembangunan daerah sehingga kemiskinan menjadikan prioritas pemerintah daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yaitu kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini juga menggunakan teknik snowball untuk mempertimbangkan keandalan informasi yang didapatkan konsisten dan menyerupai informasi yang didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten, yaitu dengan cara membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan subsidi bantuan PKH, sembako, uang tunai, listrik dan iuran jaminan kesehatan BPJS. Penyusunan anggaran diutamakan untuk program prioritas yang sesuai visi misi dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang terbatas maka perlu adanya penambahan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah selain itu juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan investor demi merealisasikan program dan kemajuan daerah Kabupaten Klaten.

Masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program bantuan pemerintah, namun perlu adanya *database* yang mencakup semua data masyarakat miskin dan adanya petugas khusus untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial tersebut. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi masyarakat yang lebih luas. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Model yang ditawarkan peneliti harapannya dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan karena dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat dan pihak independen harapannya program kegiatan yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan tepat sasaran dan merata kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran, Pengentasan Kemiskinan, Kualitatif

